



Moratorium Pembangunan Hotel akan Diperpanjang

● WAHYU SURYANA

YOGYAKARTA — Moratorium pembangunan hotel di DIY seperti ini akan diperpanjang. Pasalnya, baik gubernur maupun wali kota, tampak senada untuk lebih baik memperpanjang moratorium pembangunan hotel.

"Saya hanya berharap karena sudah terlalu banyak hotel, jadi diverifikasi betul-betul," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, usai memberi pidato sambutan di Paripurna DPRD DIY, Senin (16/10).

Ia menekankan, jika rata-rata okupansi hotel masih berkisar 45-50 persen, sebaiknya moratorium diperpanjang saja. Nanti, lanjut Sultan, jika okupansinya sudah mencapai setidaknya 70 persen baru dibuka kembali ruang untuk investasi hotel di DIY.

Sultan berpendapat, jika okupansinya tidak mencapai itu pembangunan hotel cuma akan membawa kerugian. Namun, ia menegaskan, kewenangan penerapan moratorium pembangunan hotel itu merupakan kewenangan Kabupaten atau Kota, yang berarti Bupati atau Wali Kota.

"Kalau memang rata-rata masih

berkisar 45-50, ya moratorium diperpanjang, nanti kalau sudah 70 persen baru dibuka ruang untuk investasi lagi. Kalau hanya 50 nanti begitu ada hotel *kan* semakin turun, jadi rugi *kabeh* (semua)," ujar Sultan.

Belum lagi, jarak pembangunan dan investasi paling tidak lima tahun, tidak langsung ada sesaat setelah pembangunan dilakukan. Hal itu tentu dikarenakan pertimbangan-pertimbangan lain, sehingga tentu kita tidak bisa hanya menjaga orang-orang yang akan investasi.

Senada, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menuturkan, peluang untuk dapat memperpanjang moratorium sangat besar. Tapi, ia mengaku tetap akan bertemu dulu dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan tidak akan mengambil keputusan secara sepihak saja.

Ia memperkirakan, dalam satu pekan ini pertemuan dengan PHRI akan dilakukan, dengan tajuk utama yaitu pertimbangan berapa lama moratorium akan diperpanjang. Haryadi menuturkan, okupansi hotel saat ini sendiri sudah sekitar 60 persen, dan walau memberi sinyal positif ia belum bisa memastikan sampai ka-

Jika okupansinya sudah mencapai setidaknya 70 persen baru dibuka kembali ruang untuk investasi hotel.

pan.

"Dalam pekan ini mungkin saya ketemu PHRI, memang rencananya demikian cuma kita lihat waktunya perpanjang sampai kapan," kata Haryadi.

Haryadi menerangkan, keputusan itu akan memakai pertimbangan-pertimbangan seperti kepentingan industri pada umumnya, dan pariwisata khususnya di Kota Yogyakarta. Karenanya, pertemuan tidak cuma melibatkan Pemkot dan PHRI, tapi pihak-pihak terkait perhotelan dan pariwisata. ■ ed: ferman rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005